



Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri

**PEMETAAN HOMESCHOOLING DAN KETAHANAN
(RESILIENSI) TERHADAP RADIKALISME
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

DEBBIE AFFIANTY

NIDN: 0326017403

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

2020

PEMETAAN HOMESCHOOLING DAN KETAHANAN (RESILIENSI) TERHADAP RADIKALISME DI PROVINSI SUMATERA BARAT¹

Debbie Affianty²

Abstrak

Homeschooling sejatinya muncul untuk memberikan kemudahan bagi para orangtua dalam menjadikan proses belajar menjadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka. Namun demikian penyelenggaraan *Homeschooling* seringkali membuat siswa terisolasi dari pergaulan dengan orang-orang yang memiliki cara pandang dan latar belakang yang beragam. Siswa *Homeschooling* cenderung menjadi terbiasa dengan hal-hal yang seragam dan bersifat eksklusif. Hal ini berpotensi menjauhkan mereka dari nilai-nilai demokrasi yang menekankan pada penerimaan terhadap keberagaman. Akibatnya, siswa cenderung memiliki sikap kebangsaan dan paham keagamaan yang sempit. Berdasarkan pada penelitian kualitatif yang telah dilakukan, tulisan ini akan menjelaskan tentang motivasi dari aktor-aktor *Homeschooling* yang ada di kota Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh (Kabupaten 50 Kota), Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas tipologi dan sistem pembelajaran *Homeschooling*, serta analisa tingkat ketahanan dan kerentanan *Homeschooling* terhadap pandangan radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

A. SEKILAS PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di pesisir bagian Barat Pulau Sumatera, di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia. Wilayah Provinsi Sumatera Barat secara administratif terbagi menjadi 12 kabupaten (Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat) dan tujuh kota (Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman).

¹ Hasil penelitian ini didesiminasikan dalam Konferensi Nasional tentang “Perempuan dan Ekstremisme Kekerasan” sub tema Home Schooling dan Radikalisme: Menakar Ketahanan dan Kerentanan” yang diselenggarakan oleh Working Group on Women and Preventing/ Countering Violent Extremism (WGWC) di Hotel Akmani, Jakarta, 9 Maret 2020

² Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Provinsi Sumatera Barat memiliki 5.441.197 penduduk pada tahun 2019³ dan dikenal kuat dengan adat istiadat yang didasarkan pada agama Islam, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK). Hal tersebut tercermin dalam beberapa peraturan daerah yang diterapkan. Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat kedua setelah Provinsi Jawa Barat dalam penerapan Perda yang terkait dengan agama Islam. Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan 54 buah Perda Syariah.⁴

Beberapa peraturan daerah tersebut di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang mengatur upaya pemberantasan perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat bius. Selain itu, terdapat juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7/2005 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran dan Surat Himbuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05 Perihal: Menghimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Walikota Sumatera Barat. Sementara itu di Kabupaten Lima Puluh kota yang 95% penduduknya beragama Islam juga terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 5 Tahun 2003 tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Alquran Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin.⁵ Di tingkat kota, terdapat Instruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 Tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh dan Anti Togel / Narkoba serta Berpakaian Muslim / Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kota Toleran (IKT) dari 94 kota yang dilakukan oleh Setara Institute pada tahun 2018, Kota Padang yang merupakan ibukota provinsi ini, termasuk dalam kategori memiliki toleransi rendah dengan peringkat 90 dan skor 3,45. Beberapa poin yang diamati yaitu kebebasan beragama/berkeyakinan, kesetaraan gender, inklusi sosial yang dijamin dan dilindungi UU, serta pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota terkait toleransi.⁶ Balitbang Kementerian Agama RI dalam laporan akhir tahun 2018 menyampaikan bahwa Sumatera Barat pada urutan ke-32 provinsi yang tingkat toleransinya “mencemaskan”.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/quickMap.html>.

⁴ Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016, hal. 174.

⁵ Kanwil Sumbar Koordinasikan Perda Syariah di Kab Lima Puluh Kota, <http://ham.go.id/kanwil-sumbar-koordinasikan-perda-syariah-di-kab-lima-puluh-kota/>, 31 Juli 2018.

⁶ Setara Institute, Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018.

Sementara itu, Survei Nasional PPIM UIN Jakarta tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kecenderungan tingkat radikalisme tinggi di kalangan siswa dan mahasiswa serta guru di kota Padang. PPIM UIN Jakarta juga menyebut bahwa guru agama di sekolah dan madrasah kurang menjadi sumber ilmu bagi siswa, dan opini intoleransi cukup kuat dalam pikiran dan tindakan mereka.

Salah satu kasus intoleransi di kota Padang terjadi pada bulan tahun 2017 ketika terjadi penolakan pembakaran jenazah bagi kelompok keturunan Tionghoa yang difasilitasi oleh kumpulan sosial kematian Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Pasar Bong (Pecinan). Beberapa ormas Islam seperti GNPf MUI, Forum Masyarakat Minang, dan Ormas Islam Se-Sumatera Barat menyatakan bahwa kremasi mengganggu masyarakat Islam di sekitarnya walaupun proses pembakaran dilakukan secara modern menggunakan oven dan mesin pembakaran di ruangan khusus.⁷ Menurut koordinator pendemo, lokasi krematorium hanya berjarak sekitar 40 meter dari masjid sehingga tidak etis ketika masyarakat sedang beribadah, didekatnya ada pembakaran mayat.⁸

Terkait ekstremisme kekerasan, beberapa orang asal Provinsi Sumatera Barat telah dipenjara karena diduga terlibat jaringan dan aksi terorisme. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius, sampai dengan tahun 2017, narapidana terorisme tersebut berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada Tabel.⁹

No.	Nama	Asal Kota
1.	PR alias UJ	Padang
2.	Ys alias KH	Padang Panjang
3.	Jt alias H alias Haf	Payakumbuh
4.	R alias I Alias Z Alias AZ	Bukittinggi
5.	Hb	Bukittinggi
6.	HJern	Bukittinggi
7.	Ah	Bukittinggi

⁷ Siaran Pers Setara Institute tentang Kasus Penolakan Pembakaran Mayat bagi Komunitas Keturunan Tionghoa di Padang, <http://setara-institute.org/kasus-penolakan-pembakaran-mayat-bagi-komunitas-keturunan-tionghoa-di-padang>, 23 Maret 2017.

⁸ Lagi, Jamaah Masjid Muhammadan Gelar Aksi Tuntut Krematorium Milik Perkumpulan Etnis Tionghoa Ditutup <https://www.bentengsumbar.com/2017/03/lagi-jamaah-masjid-muhammadan-gelar.html>, 22 Maret 2017.

⁹ Mohammad Arya, Daftar Terduga Teroris Asal Sumbar yang Dirilis BNPT, 8 Agustus 2017, <https://padangkita.com/daftar-terduga-teroris-asal-sumbar-yang-dirilis-bnpt/>, diakses 30 September 2019.

8.	Rrp alias Aw alias R	Bukittinggi
9.	Fitr alias Butet	Bukittinggi
10.	Asm	Pasaman
11.	AH alias M	Pasaman
12.	APR	Pasaman Barat
13.	Y alias H	Koto Kecil Pasaman
14.	Mass	Tapian
15.	R alias I	Tapian
16.	DS alias A alias AI	Sangir Solok Selatan

Pada bulan Agustus tahun 2018, Densus 88 menangkap tiga terduga teroris di Padang, satu di Bukittinggi dan satu di Payakumbuh yang merupakan anggota Jamaah Ansharud Daulah (JAD).¹⁰ Selain itu, pada bulan Juli 2019, Densus 88 menangkap Novendri di Padang Barat karena terlibat dalam rencana pengeboman fasilitas dan kantor polisi di Sumatera Barat pada 17 Agustus 2019.¹¹

Berdasarkan beberapa kasus intoleransi dan ekstremisme kekerasan di atas, penelitian ini berfokus pada institusi pendidikan sebagai sarana penanaman dan penyebaran paham keagamaan sempit yang seringkali melahirkan sikap dan tindakan intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Berkaca pada kasus bom Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga di mana anak-anaknya dididik dengan metode homeschooling, penelitian ini akan mencoba melihat keberadaan, praktek dan kebijakan tentang homeschooling di Provinsi Sumatera Barat, apakah dapat memperkuat daya tahan masyarakat atau justru menimbulkan kerentanan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Benarkah homeschooling menjadi pusat tumbuh kembang paham radikalisme? Sejauhmana homeschooling mengikuti kurikulum nasional dan terlibat menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan mencegah intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan? Apakakah permasalahan dan tantangan homeschooling untuk berperan mengembangkan toleransi dan pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan?

B. TIPOLOGI HOMESCHOOLING DI PADANG, PADANG PANJANG DAN PAYAKUMBUH

¹⁰ Rahmadhani, "Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris di Sumatera Barat", <https://regional.kompas.com/read/2018/08/13/21050791/densus-88-tangkap-5-terduga-teroris-di-sumatera-barat>.

¹¹ Halida Bunga, "Densus 88 Kembangkan Kasus Terduga Teroris di Sumatera Barat", 13 Agustus 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1235314/densus-88-kembangkan-kasus-terduga-teroris-di-sumatera-barat/full&view=ok>

Sebagian besar homeschooling yang menjadi informan di Provinsi Sumatra Barat dalam penelitian ini merupakan **homeschooling tunggal**, di mana orangtua menjadi guru bagi anak-anak mereka sendiri. Dalam penelitian ini, ada tiga keluarga homeschooling tunggal, yaitu keluarga Hana dan Adit (Kota Padang), keluarga Cokro dan Nita serta keluarga Ita (Kota Payakumbuh).

Adapun **homeschooling majemuk** di Provinsi Sumatra Barat masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip di mana beberapa keluarga homeschooling tunggal saling berbagi mengajar anak-anak mereka. Homeschooling Majemuk yang ada hanya menyelenggarakan pertemuan bersama antar orangtua Homeschooling Tunggal dalam periode tertentu untuk memperbaharui pengetahuan mereka, berbagi pengalaman serta saling menyemangati. Namun proses pembelajaran tetap berlangsung di dalam keluarga inti (Homeschooling Tunggal). Untuk Kabupaten 50 Kota, ada Dara yang menjadi koordinator HS Umat Mulia. Di Kota Payakumbuh juga ada Vina, orangtua yang anak perempuannya pernah menjalani homeschooling majemuk ketika keluarganya menetap di Yogya.

Homeschooling komunitas di Provinsi Sumatra Barat juga beragam, ada yang berbentuk seperti pesantren, seperti yang diterapkan oleh PKBM Markazul Qur'an (Kota Padang Panjang). Ada yang berbentuk pengajaran untuk masyarakat umum yang memiliki keterbatasan atau yang memilih jalur sekolah non formal, seperti yang dilakukan oleh PKBM Farilla Ilmi (Kota Padang). Selain itu, ada juga yang berbentuk seperti les privat, seperti yang dilakukan oleh PKBM Homeschooling (HS) Primagama Padang (Kota Padang).

Informan kunci dari penelitian ini tersebar di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh (Kabupaten 50 Kota). Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan data tentang praktisi homeschooling di masyarakat Sumatra Barat akibat ketiadaan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat kota maupun kabupaten. Selain sebagai ibukota Provinsi, Kota Padang dipilih untuk melihat fenomena homeschooling di wilayah perkotaan. Kota Padang pada tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 950.871 jiwa.¹² Sedangkan Kota Padang Panjang dipilih karena daerah tersebut terkenal dengan budaya pesantrennya, seperti Pondok Pesantren Thawalib Padang Panjang dan Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang yang

¹² <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2019/06/17/321/penduduk-provinsi-sumatera-barat-menurut-kabupaten-kota-2019.html>

sudah berdiri sejak awal tahun 1900-an. Kota Padang Panjang pada tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 53. 693 jiwa.¹³ Menurut Setara Institute, Kota Padang Panjang memiliki indeks toleransi di urutan 78 dengan skor 4,12. Kota Payakumbuh merupakan kota transit yang menjadi basis banyak organisasi ataupun gerakan Islam seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, serta Majelis Tabligh. Kota Payakumbuh pada tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 135. 573 jiwa.¹⁴ Menurut Setara Institute, Kota Payakumbuh memiliki indeks toleransi di urutan 84 dengan skor 3,78.

Adapun daftar responden yang menjadi narasumber di tiga kota di Provinsi Sumatra Barat adalah:

No	Jenis Homeschooling	Nama Responden	Status
1.	Homeschooling Tunggal	1. Hana dan Adit	Ibu dan ayah dari anak usia 4 dan 6 tahun (usia setara PAUD dan TK)
		2. Cokro dan Nita	Ayah dan ibu dari anak usia 10 tahun (setara SD)
		3. Ita	Ibu siswa/i setara SD, SMP dan SMA, guru anak-anaknya.
		4. Luna	Siswi setara lulusan SMA
2.	Homeschooling Majemuk	5. Dara (HS Umat Mulia)	Koordinator 10 keluarga, ibu siswa/i setara PAUD, SD dan SMP, guru anak-anaknya.
		6. Vina	Ibu siswi setara lulusan SMA.
3.	Homeschooling Komunitas	HS Markazul Qur'an	
		7. Fenny	Pengelola
		8. Wulandari	Guru (Perempuan)
		9. Randy	Guru (Laki-Laki)
		10. Saras	Siswa (Perempuan)
		11. Mawar	Orangtua (Perempuan)
		PKBM Farilla Ilmi	
		12. Hj. Amaniarty	Pengelola
		13. Gatot	Guru (Laki-Laki)
		14. Fitri	Siswi setara kelas 3 SMA

¹³ <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2019/06/17/321/penduduk-provinsi-sumatera-barat-menurut-kabupaten-kota-2019.html>.

¹⁴ <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2019/06/17/321/penduduk-provinsi-sumatera-barat-menurut-kabupaten-kota-2019.html>

		PKBM HS Primagama	
		15. Aldino	Pengelola
		16. Tiwi	Guru (Perempuan)
		17. Siska	Ibu siswa setara SD
		18. Nanda	Siswa SMP Kelas 3

C. DEFINISI HOMESCHOOLING MENURUT INFORMAN KUNCI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sebagian besar praktisi homeschooling di Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh menganggap yang membedakan homeschooling dengan sekolah formal adalah pendidikan yang berbasis keluarga. Namun demikian, proses belajar mengajar bisa bervariasi, ada keluarga yang mendidik anak mereka sendiri, ada yang memanggil guru ke rumah atau anaknya datang ke tempat bimbingan belajar, atau anaknya belajar bahkan beresrama di sekolah tahfidz. “Rasanya juga lebih maksimal kalau kita sendiri yang *handle* anak kita...Memang *kan* kita di dalam Islam ya, pendidik pertama itu ibu,” ujar Hana (bukan nama sebenarnya), orangtua homeschooling tunggal dari anak setara PAUD dan TK (usia 4 tahun dan 6 tahun).¹⁵

Hal senada juga dinyatakan oleh Cokro (bukan nama sebenarnya), praktisi homeschooling tunggal, ayah dari anak-anak usia 10 tahun (setara kelas 4 SD). Menurutnya, urusan pendidikan bagi anak-anak itu yang paling berperan dan bertanggung jawab adalah orang tua, pihak lain hanya membantu. “Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Sama seperti konsep gereja. Gereja itu bukan berarti ruang saja. Tapi lebih ke bagaimana kita yakini tempat belajar dan tempat beribadah. Mesjid juga bisa di definisikan dengan demikian. Tapi mesjid agak susah. Kalau saya dengar dari teman itu gereja itu bukan ruang tapi lebih ke tempat berbagi. Sama seperti sekolah. Sekolah itu bukan ruang yang hanya ada interaksi guru dan murid. Sesekali meneliti alam di luar sana, yang penting ada interaksi. Anak-anak pun juga bisa mendidik dirinya sendiri. Dia punya dunianya sendiri. Dia belajar dari dunianya sendiri. Itulah bagaimana pendidikan dipikirkannya sendiri. Bukan dibangun dari kita,” ujarnya.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Hana, Padang, 10 Agustus 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Cokro, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.

Ita (bukan nama sebenarnya), ibu yang sudah menjalankan homeschooling bagi ketiga anaknya selama 17 tahun (usia setara SD, SMP dan SMA), memandang homeschooling memiliki konsep belajar yang berbeda dengan konsep belajar di sekolah biasa. “Kalau anak sekolah kan belajarnya pergi ke sekolah, ada ruang kelas, duduk di kelas, mendengarkan guru, bikin PR, tugas, segala macam. Kalau kita belajar itu tidak di ruang kelas. Kita belajar di mana saja, kapan saja, menggunakan apa saja. Pokoknya apapun kegiatan kita, kita tetap dalam proses belajar. Jadi jangan mimpikan anak-anak seperti belajar di sekolah,” ujar Ita.¹⁷

Homeschooling, menurut pemahaman Aldino, pemilik PKBM HS Primagama Padang, terbagi menjadi dua macam. Pertama, homeschooling di mana proses belajar dilakukan di rumah dan orang tua yang berfungsi sebagai manajer, guru, fasilitator, teman belajar dan lainnya. Kedua, homeschooling dalam arti substantif, dimana anak yang belajar ditemani oleh seseorang yang berfungsi sebagai tutor, fasilitator dan dilakukan di luar sekolah, seperti di Primagama.¹⁸

Sedangkan Ainul Huda, pengelola PKBM HS Markazul Qur’an, memaknai homeschooling sebagai proses anak belajar seperti dengan orangtua sehingga membuat mereka merasa nyaman.¹⁹ Institusinya berawal dari homeschooling tunggal tahfidz namun kemudian menerima siswa lain yang tinggal di asrama (*boarding*, setara SMP dan SMA) serta yang setengah hari (setara SD).

Sementara itu Vina (bukan nama sebenarnya), ibu dari anak (setara SMA kelas 3) yang mengikuti homeschooling majemuk, menganggap saat ini homeschooling sudah diterjemahkan menjadi berbagai macam bentuk. “Kalau homeschooling dalam pandangan saya dan teman-teman, adalah orangtua yang mendidik anak. Kita yang menjadi pondasi awal untuk pergerakan pemikiran anak. Menurut saya saat ini sudah tidak satu pendapat lagi. Ada yang sudah komersilkan. Kalau *trend* sekarang, sebagian orangtua yang punya duit, anaknya di-*homeschooling*-kan, bukan dia yang meng-*handle* tapi orang lain yang dibayar untuk mengajarkan anak. Tapi tetap dinamakan *homeschooling*,” katanya.²⁰

¹⁷ Wawancara dengan Ita, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Aldino, Padang, 14 Agustus 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Ainul Huda, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.

²⁰ Wawancara dengan Vina, Payakumbuh, 13 Agustus 2019.

Dara (bukan nama sebenarnya), koordinator HS Umat Mulia (bukan nama lembaga sebenarnya), homeschooling majemuk yang beranggotakan 10 homeschooling tunggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, berpendapat bahwa homeschooling harus mampu mengikuti kondisi lingkungan dan tuntutan yang berbeda serta keinginan anak-anak. “Selagi yang baik tidak terhambat, potensi baik muncul. Yang baik bisa diambil dan apa yang buruk ditinggalkan,” ujarnya.²¹ Dara memiliki 6 orang anak, dua menjalani homeschooling setara SMP, dua ikut homeschooling setara SD, satu berusia 5 tahun (homeschooling setara TK) dan satu anak berusia 3 tahun (homeschooling setara PAUD).

D. MOTIVASI PRAKTISI HOMESCHOOLING

Praktisi homeschooling di Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh memiliki motivasi yang beragam. Setidaknya ada dua pola yang ditemukan dari sejumlah responden yang ditemui: pertama, homeschooling sebagai ekspresi penolakan terhadap sekularisme; dan kedua, homeschooling sebagai ekspresi penolakan terhadap sistem sekolah formal yang kaku dan tidak ramah anak. Dengan kata lain, para praktisi homeschooling memilih HS karena alasan keyakinan/ideologis (mencari model yang sesuai dengan ajaran agama) dan juga praktis (anak berkebutuhan khusus, anak trauma karena perundungan, faktor ekonomi, pengembangan minat dan bakat, dan sebagainya).

Faktor keyakinan menjadi pendorong utama homeschooling komunitas PKBM Markazul Qur'an yang menyelenggarakan sistem pendidikan berfokus pada hapalan Al Qur'an (Tahfidz). Pendiri Markazul Qur'an (Ustadz Idris dan Ustadzah Tuti) ingin anak-anaknya menjadi Hafiz Qur'an seperti mereka. “Karena keduanya Hafidz, sedangkan sekolah formal, walaupun Islam Terpadu, sulit bagi mereka mengejar tahfidznya. Jadi mereka mengajar sendiri anak-anak mereka tujuh tahun lalu.” kata Ainul pengelola PKBM HS Markazul Qur'an. Lama kelamaan banyak orangtua yang menitipkan anaknya dan akhirnya Markaz menyediakan guru-guru sendiri dan menjalankan sistem *boarding* (asrama) pada HS tersebut. “Saya yakin orang-orang yang dekat dengan Al Qur'an itu adalah orang-orang yang Allah dekatkan juga. Penghafal Al Qur'an itu pasti dunianya mengikuti. Karena dunia itu ibarat bayangan, kalau kita lari,

²¹ Wawancara dengan Dara, Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 Agustus 2019.

bayangan itu yang akan mengikuti. Kalau mereka sudah dapat Al Qur'annya mereka pasti bisa bersaing dengan dunia lain,” kata Ainul.²²

Senada dengan itu, homeschooling majemuk HS Umat Mulia dibentuk karena keinginan untuk merawat nilai-nilai keIslaman serta menjaga anak-anak mereka dari sistem sekuler yang dianggap tidak Islami. Dara merasa tergerak untuk membuat homeschooling majemuk setelah merasa terpanggil untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. “Saya pikir kenapa tidak bikin sekolah sendiri, bikin belajar sendiri, saya bikin modul, saya bikin kurikulum untuk anak saya sendiri. Jadi landasannya itu Qur'an. Saya pikir selama ini saya menyelamatkan orang dari api neraka. Tapi anak saya sendiri saya tinggalkan. Kayaknya kita mesti ganti sistemnya. Keluarga kita dulu orang lain itu bonus,” ujarnya. Setelah berjalan beberapa bulan, Dara bertemu beberapa keluarga yang merasa senasib sepejuangan. “Lama-lama mereka bilang ayolah *uni* programnya kita *expose*, setidaknya orang-orang yang membutuhkan bisa bersama. Setidak-tidaknya bersinergi sama-sama. Saya pikir kenapa tidak. Berjamaah lebih baik dari pada sendirian. Akhirnya, bulan Mei lalu (2019) kami buat HS Umat Mulia,” kata Dara.²³

Sementara itu Vina (bukan nama sebenarnya) mendidik anak perempuannya di homeschooling majemuk karena pertimbangan adat matrilineal (peran utama perempuan dalam relasi sosial) di Sumatera Barat. “Sathira anak perempuan saya satu-satunya. Kalau di Minangkabau ini berapapun jumlah anak, pasti yang ditanya berapa orang anak perempuannya? Nah, jadi kami melihat pola asuh beberapa sekolah tidak cocok untuk Sathira. Jadi saya bikin kurikulum sendiri di rumah. Kita yang ajarin semua,” ujar Zakiati.²⁴ Dia kemudian bergabung dengan homeschooling majemuk untuk saling berbagi ilmu pengetahuan.

Keluarga Hana dan Adit menerapkan homeschooling tunggal dengan harapan anak-anak mereka yang berumur 4 tahun dan 6 tahun dapat mengembangkan kemampuan akademik mereka tanpa harus terbebani oleh sistem pendidikan yang menyeragamkan kemampuan semua anak. “Yang paling mendasari kenapa kami memilih homeschooling karena ingin memberikan pendidikan yang *customized*. Di sekolah *kan* disamakan, seragam. Kita lihat anak yang kakak-

²² Wawancara dengan Ainul Huda, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.

²³ Wawancara dengan Dara, Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 Agustus 2019.

²⁴ Wawancara dengan Vina, Payakumbuh, 13 Agustus 2019.

adik aja beda. Pendekatan yang sama ke abang tidak bisa untuk adik juga diterapkan,” kata Hana.²⁵

Sementara itu keluarga Cokro dan Nita memilih untuk menerapkan homeschooling tunggal pada salah satu dari ketiga anaknya (saat ini berusia 10 tahun) karena anak tersebut mengalami perundungan (*bullying*) ketika mulai belajar di sekolah dasar formal. “Teman-taman ada yang manggil musang. Dipanggil musang, dipanggil pisang. Ihsang udah baik-baik sama dia ma. Tapi balas nya tetap juga gitu,” ujar Isang,” ujar sang anak. Sejak itu sang anak merasa tidak nyaman dan tidak mau pergi sekolah lagi. Orangtuanya kemudian memutuskan untuk menjalani homeschooling untuk anak mereka. “Ternyata ada payung hukumnya. Ya kita percaya diri aja. Terus kita lihat ada beberapa berita dan ternyata banyak yang bisa kuliah,” kata Cokro.²⁶

Berbeda dengan kedua keluarga di atas, Mawar (bukan nama sebenarnya, Kota Padang Panjang) dan Siska (bukan nama sebenarnya, Kota Padang) mengikutsertakan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus sebagai siswa didik di homeschooling komunitas. Mawar menyekolahkan anaknya di PKBM HS Markazul Qur’an sejak kelas 4 SD. “Sekolah formal kan ibaratnya *full* pelajarannya, kalau di sini anak bisa nyaman. Jadi tidak terpaksa. Karena anak saya harus didampingi tapi tidak bisa didampingi oleh orangtua. Kalau di sini kan boleh. Anak saya kan Autis, jadi kuatnya di hapalan,” ujar Mawar.²⁷ Anak pertamanya, Putra (bukan nama sebenarnya) menyandang autisme. “Susah kalau Putra. Cuma kalau dia sudah nyaman, jauh pesat perkembangannya. Dulu Putra sebelum masuk sini ibaratnya gak bisa apa-apa. Ngomong pun gak bisa. Sekarang banyak perubahannya. Apalagi dia suka ustadzahnya. Pas wisuda Maret, masih 9 juz sekarang sudah 10 juz hapal,” kata Mawar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Siska, ibu dari Peter (setara usia kelas 1 SD) yang belajar di PKBM HS Primagama. Menurutnya, homeschooling lebih tepat karena Peter tergolong anak hiperaktif dan belum siap untuk belajar di sekolah umum. “Anak lebih santai, lebih rileks, tidak seperti di sekolah umum. Kalau di sekolah umum, kan nilai harus bagus,” ujar Siska.²⁸ Dia sendiri tidak sanggup jika harus mengajar anaknya di rumah karena sibuk mengurus kakak dan adik Peter.

²⁵ Wawancara dengan Hana, Padang, 10 Agustus 2019.

²⁶ Wawancara dengan Cokro, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.

²⁷ Wawancara dengan Mawar, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.

²⁸ Wawancara dengan Siska, Padang, 15 Agustus 2019.

Menurut Aldino, pemilik PKBM HS Primagama Padang, lembaganya dibentuk untuk membantu peserta didik yang bermasalah di tempat atau lingkungan belajar di sekolah formal. “Ada anak yang sering di-*bully* oleh temannya di sekolah, ada yang secara kemampuannya bermasalah seperti membaca dan menulis. Ada juga yang memiliki perbedaan perilaku dari rata-rata anak biasa seperti penyandang autisme dan lainnya,” ujarnya.²⁹

Sementara itu pemilik Homeschooling Komunitas PKBM Farilla Ilmi, Hj. Amaniarty mengatakan semula lembaganya hadir untuk membantu anak-anak nelayan dan pemulung yang tidak bersekolah. Akhirnya saat ini PKBM tersebut juga melayani anak-anak dari homeschooling tunggal yang ingin mengambil ujian paket penyetaraan. “Karena orang tuanya mungkin takut dengan situasi anak-anak remaja saat ini. Jadi lebih baik anaknya dididik di rumah. Iya, homeschooling. Dia juga minta guru kita nanti sekali-sekali datang ke rumahnya untuk datang mengajari anaknya,” ujarnya.³⁰

E. KURIKULUM DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR HOMESCHOOLING DI SUMATERA BARAT

Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar yang diterapkan praktisi homeschooling di Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh sangat beragam. Ita, praktisi HS tunggal, menerapkan jam belajar dari jam 8 pagi sampai jam 11 dengan kurikulum yang didesain sendiri berdasarkan minat dan bakat anak-anaknya. “Yang penting dalam sehari itu harus ada al-Qur’an dan agama. Anak-anak bebas mengerjakan kegiatan apa saja asal bermanfaat,” ujarnya. Anak-anak Ita ada yang senang belajar memasak, ada yang membuat blog dan ada yang senang karate.

PKBM HS Markazul Qur’an semula memakai kurikulum tahun 2006 namun sejak terdaftar, mereka berusaha mengikuti kurikulum 2013,” ujar Ainul, pengelola PKBM HS Markazul Qur’an. Sistem belajar di PKBM menggunakan sistem halaqoh (melingkar) di saung, atau di lapangan. “SMP dan SMA belajar juga praktek dengan memakai apa yang ada. Kita ada keterbatasan lab, jadi kreativitas guru saja,” ujar Mike, pengajar Biologi. Dengan fokus tahfidz, PKBM ini menekankan pada kegiatan menghafal Al Qur’an. Siswa yang tidak mondok, harus mengulang-ulang hafalannya di rumah.

²⁹ Wawancara dengan Aldino, Padang, 14 Agustus 2019.

³⁰ Wawancara dengan Hj. Amaniarty, Padang, 14 Agustus 2019.

F. DAYA TAHAN /KERENTANAN HOMESCHOOLING TERHADAP INTOLERANSI, RADIKALISME DAN EKSTREMISME

Radikalisme, terutama yang berkaitan dengan agama, merupakan konsep yang memiliki beberapa padanan. Terkadang disamakan dengan puritanism, extremism, militancy, dan fundamentalism. Radikalisme didefinisikan O' Ashour (2009) sebagai “menggunakan cara-cara yang menolak prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai tujuan politik tertentu”. Juga Hafez (2015) sebagai “adopsi pandangan kelompok ekstremis untuk memengaruhi perubahan sosial atau politik”.

Penelitian ini menggunakan definisi radikalisme sebagai ide dan tindakan untuk perubahan sosial politik secara fundamental dan menjustifikasi penggunaan kekerasan, baik verbal maupun aksi, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) menolak secara ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dalam berbagai bentuknya (termasuk di dalamnya menolak Pancasila, menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menolak hormat kepada bendera Merah-Putih); (2) intoleran terhadap keragaman; (3) menolak berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda (eksklusif); (4) mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dan menganggap dirinya paling benar; dan (5) mendukung kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Konsep ketahanan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tolok ukur, yaitu: (1) implementasi Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah, di mana penyelenggara mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) penerapan kurikulum nasional; dan (3) terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda.

Sedangkan konsep kerentanan menggunakan beberapa tolok ukur perilaku yang berdasarkan pada keyakinan (ideologis), yaitu: (1) menolak upacara bendera Merah-Putih; (2) menolak untuk memperkenalkan pahlawan nasional; (3) menolak untuk mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (4) menolak memperkenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang garuda, pahlawan nasional).

Konsep “spiral pengucilan diri” (spiral encapsulation) dalam konteks penelitian ini digunakan untuk melihat ketahanan dan kerentanan HS terhadap intoleransi dan radikalisme, karena

sikap pengucilan diri memiliki potensi menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (common values) lain yang membuka cakrawala berpikirnya (Porta, 1995).

Berdasarkan temuan di lapangan, homeschooling di tiga kota di Sumatera Barat terbagi menjadi dua tipologi, yaitu homeschooling umum atau non agama dan homeschooling agama. Keduanya dibedakan secara lebih rinci sebagai berikut:

Umum/Non-Agama	Agama
Berorientasi pada negara-bangsa	Berorientasi pada al-Qurán dan Hadis/Kitab Suci agama lain
Buku-buku umum	Buku-buku agama
Materi pelajaran umum	Nilai-nilai agama menjadfi penentu
Penerimaan siswa yang heterogen	Penerimaan siswa yang homogen
Guru/fasilitator heterogen	Guru/fasilitator homogen

1. Homeschooling, Inklusivisme dan Toleransi Beragama

Homeschooling Tunggal yang peneliti wawancara berusaha mendidik anak-anaknya untuk terbuka pada keragaman etnis maupun agama. Hana dan Adit, misalnya sering membawa anak mereka ke kampung budaya yang berlokasi tidak jauh dari rumah mereka. Begitu juga dengan Cokro dan Nita yang terbuka memperkenalkan dan menjelaskan perbedaan agama dan etnis di Indonesia kepada anak mereka. “Kemarin Pemilu itu ya di recokin masalah ini. Ada itu sepupunya bilang, Nan, itu ada orang Cina, jangan di ini....Emangnya Cina itu kenapa, ma,” tanya anaknya. Hana kemudian menjelaskan bahwa di negara manapun pasti ada orang yang gak bagus. Seperti di film, ada Cina yang tidak bagus tetapi ada yang seperti kungfu Panda yang bagus. Hana juga menjelaskan kepada anak pertamanya ketika bertanya mengapa ada orang yang tidak sholat dan bukan Islam. Juga ketika anak keduanya berkata mengapa beragama Islam dan tidak mau beragama Islam.

Sementara itu HS Umat Mulia dan PKBM HS Markazul Qur’an tidak membuka diri untuk berinteraksi dengan orang-orang non Muslim. Ketika ditanya tentang toleransi, "Jadi toleransi itu seperti tasamuh beragama, misalkan kita bergaul sesama manusia, bersosial, kalau misal beda agama misalnya, dia agama dia kita agama kita, lakum diinukum waliyadin. Kalau anak-anak di sini belum pernah praktek. Soalnya saya belum pernah menemukan orang itu yang selain agama Islam. Karena itu, untuk tasamuh itu sendiri, toleransi beragama, sosial, itu belum

sampai pelajarannya," ujar Jamaludin, pengajar Tahfiz dan PAI di PKBM HS Markazul Qur'an. Mengenai pergaulan dengan agama lain, menurut Jamal: "Kebetulan di kompleks dekat Markazul Qur'an ada orang Kristen. Kita bersosialisasi, kita azan mereka biasa aja. Ketika ada di keluarga mereka, misalnya malam minggu ada "pengajian" dia, ngak papa, kita biasa juga, toleransi kita gitu. Misalnya mereka minjam tempat parkir, ustadz ada acara di sini, pinjam parkir mobil, ya kita gitu aja."

"Toleransi secara umum, tapi tidak secara mendalam. Di Padang Panjang orang Kristen juga ada, gereja juga ada. Mengajarkan toleransinya dengan mengajarkan jangan mengecam orang lain jauh lebih buruk dari kita. Mereka juga baik-baik. Cuma akidahnya jangan dicampurkan. Mereka sudah ngerti, bekal dari orangtua juga sudah banyak," ujar Mike, pengajar Biologi. "Kita sih kalau yang dilarang Rasulullah berarti gak boleh. Kita harus bertegas-tegas. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Cuma kan pandai-pandai kita cara penyampaiannya. Kalau caranya ringan, orang pun bisa menganggapnya menjadi ringan," kata Ainul.

2. Homeschooling dan Nasionalisme

Pendidikan cinta tanah air dan rasa nasionalisme juga ditanamkan pada homeschooling tunggal yang ditemui peneliti. Hana dan Cokro membawa anak mereka ke upacara bendera di tempat mereka bekerja. "Di Unand (Universitas Andalas) waktu pertama dia ikut, waktu hari pendidikan," kata Hana. Hana juga mengajari anaknya untuk menghafal lagu Indonesia Raya. Untuk wawasan kebangsaan, menurutnya banyak sekali yang bisa disampaikan ketika melakukan perjalanan. "Seperti yang di Simpang Haru ada patung api, dia nanya ini patung apa. Di situ peran saya menjelaskan. Dia datang kesini dia mau main kesini kita engga boleh. Jadi dijelaskan Belanda yang tidak bagus itu disuruh pulang ke tempatnya. Karena tidak mau dipulangkan dan melawan, kita bilang bahwa mereka diusir pakai bambu," kata Hana.

Sementara itu, negara tidak hadir pada Homeschooling Majemuk dan Homeschooling Komunitas yang ditemui peneliti. Ainul, pengelola PKBM HS Markazul Qur'an, menjelaskan kalau HSnya melakukan upacara setidaknya sekali setahun. "Kita ada kog KWN (kewarganegaraan). Jadi lebih ke pengetahuan. Lebih pengenalan. Kalau kedaerahannya lebih kearifan lokal, di permukaan aja. Kalau kedaerahan sih lebih ke Bahasa, makanan, kebudayaan tapi itu sebatas pengetahuan." Sedangkan menurut Zuhrotul Hayati, siswa setara SMP Kelas 3, "upacara-nya engga ada tapi merayakan (17 Agustus) ada sama anak-anak asrama lain."

Sedangkan PKN, menurutnya, dipelajari ketika kelas 3 SMP ini. "Belajarnya seperti tentang norma-norma, kayak norma agama" ujar Zuhratul Hayati.

3. Kesetaraan Gender

Pendidikan tentang peran gender dan pemberian kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam mengakses fasilitas pendidikan, berekspresi atau mengeluarkan pendapat serta berprestasi ditanamkan pada sebagian besar Homeschooling di tiga wilayah Sumatra Barat. Pembagian peran antara ayah dan ibu yang menjalani Homeschooling dalam membantu anak-anaknya dalam belajar, terlihat cukup seimbang.

Namun ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik perempuan di beberapa Homeschooling yang peneliti temui. Hal ini terkait dengan pandangan keagamaan lembaga Homeschooling itu sendiri, maupun pandangan keagamaan pribadi peserta didik itu sendiri. "Untuk sekarang kita belum bisa memisahkan para siswa perempuan dan laki-laki karena inilah realitas sekarang. Kita tapi menggunakan hijab/partisi karena pubertas itu susah ya bu, ya. Pasti mereka kan ada jalannya. Jadi ada hijab, batas antara siswa laki-laki dan siswa perempuan," ujar Mike, pengajar Biologi. Sedangkan menurut Zuhratul Hayati, siswa kelas 3 SMP PKBM HS Marqazul Qur'an: "Kalau menari kan ga boleh. Kayak menunjukkan bentuk tubuh."

G. REGULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG HOMESCHOOLING SERTA PROMOSI MODERASI BERAGAMA

Eksistensi Homeschooling sudah diakomodasi oleh negara sejak keluarnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di dalam UU tersebut, disebutkan ada tiga jalur pendidikan yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu: jalur pendidikan formal (sekolah), nonformal (kursus dan pendidikan kesetaraan), serta informal (pendidikan oleh keluarga dan lingkungan). Pengakuan oleh negara lebih jauh juga ditunjukkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 129 Tahun 2014 tentang "Sekolah Rumah" (*homeschooling*). Pada Pasal 1 Ayat (4) disebutkan: yang dimaksud sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain. Sementara bisa dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana kondusif. Ini bertujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara

maksimal. Selanjutnya pada pasal 7 Ayat (1) disebutkan: kurikulum yang diterapkan dalam sekolah rumah mengacu pada Kurikulum Nasional. Berikutnya, Ayat (3): kurikulum yang dimaksud sebagaimana Ayat (1) yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat potensi dan kebutuhan peserta didik.

Meskipun di tingkat pusat sudah ada regulasi yang mengatur tentang Homeschooling, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Padang, Padang Panjang dan Kabupaten 50 Kota di Provinsi Sumatra Barat belum memiliki kebijakan operasional di wilayah mereka yang terkait dengan Homeschooling. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nurul Maulida Syams, selama ini tidak ada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perijinan, pengelolaan dan pengawasan Homeschooling. “Jadi kita minta juga dari pusat apa yang harus kita buat. Kedatangan bapak dan ibu ini bisa memotivasi kita lagi ya. Tapi kita tidak ada acuan itu dari mana. Pembelajaran itu seperti apa atau tatap muka nya bagaimana. Harapan kami ya, berilah kami acuannya. Seperti kami mengelola PKBM, mengelola PBM,” ujarnya.³¹

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Kabupaten 50 Kota, Dedi Hendri. Menurutnya, kegiatan Rumahsekolah tidak terdata baik di Kabupaten tersebut maupun di Kota Payakumbuh. “Pertama, mungkin di program kita belum tercover yang namanya homeschooling. Kemudian pengelola atau lembaga yang itu mungkin belum pernah sosialisasi atau melaporkan lembaga nya ke dinas pendidikan sehingga kami tidak terpantau keberadaan homeschooling,” katanya.³²

H. KESIMPULAN

Keberadaan Homeschooling di Sumatera Barat masih belum berada dalam pengawasan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini membuat masing-masing praktisi Homeschooling bebas menentukan tipe Homeschooling serta materi kurikulum yang akan mereka terapkan pada anak-anak mereka, sesuai dengan motivasi orangtua dan minat anak.

³¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nurul Maulida Syams di Kota Padang, 8 Agustus 2019.

³² Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Dedi Hendri, 20 Agustus 2019.

Ketiadaan pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat membuka peluang peserta didik dalam praktek Homeschooling menjadi tidak mendapatkan pengetahuan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Mereka lebih banyak mendapat informasi dan pengetahuan yang bersifat parsial. Bagi peserta didik pada homeschooling yang mendapatkan materi kurikulum dari sumber yang beragam lebih cenderung menghargai perbedaan dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Sementara peserta didik pada homeschooling yang mendapatkan materi kurikulum dari sumber yang monolitik (seragam) cenderung tidak menghargai perbedaan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengatur keberadaan Homeschooling di tingkat nasional sehingga terdapat kontrol kualitas dan evaluasi hasil pendidikan pada homeschooling di tingkat Kota/Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.

INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/quickMap.html>.

Halida Bunga, "Densus 88 Kembangkan Kasus Terduga Teroris di Sumatera Barat", 13 Agustus 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1235314/densus-88-kembangkan-kasus-terduga-teroris-di-sumatera-barat/full&view=ok>

Kanwil Sumbar Koordinasikan Perda Syariah di Kab Lima Puluh Kota, <http://ham.go.id/kanwil-sumbar-koordinasikan-perda-syariah-di-kab-lima-puluh-kota/>, 31 Juli 2018.

Lagi, Jamaah Masjid Muhammadan Gelar Aksi Tuntut Krematorium Milik Perkumpulan Etnis Tionghoa Ditutup
<https://www.bentengsumbar.com/2017/03/lagi-jamaah-masjid-muhammadan-gelar.html>, 22 Maret 2017.

Mohammad Arya, Daftar Terduga Teroris Asal Sumbar yang Dirilis BNPT, 8 Agustus 2017, <https://padangkita.com/daftar-terduga-teroris-asal-sumbar-yang-dirilis-bnpt/>, diakses 30 September 2019.

Rahmadhani, "Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris di Sumatera Barat", <https://regional.kompas.com/read/2018/08/13/21050791/densus-88-tangkap-5-terduga-teroris-di-sumatera-barat>.

Siaran Pers Setara Institute tentang Kasus Penolakan Pembakaran Mayat bagi Komunitas Keturunan Tionghoa di Padang, <http://setara-institute.org/kasus-penolakan-pembakaran-mayat-bagi-komunitas-keturunan-tionghoa-di-padang>, 23 Maret 2017.

LAPORAN

Setara Institute, Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018.

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nurul Maulida Syams di Kota Padang, 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Mawar, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ainul Huda, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Hana, Padang, 10 Agustus 2019.

Wawancara dengan Dara, Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 Agustus 2019.

Wawancara dengan Cokro, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ita, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.

Wawancara dengan Vina, Payakumbuh, 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Aldino, Padang, 14 Agustus 2019.

Wawancara dengan Hj. Amaniarty, Padang, 14 Agustus 2019.

Wawancara dengan Siska, Padang, 15 Agustus 2019.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Dedi Hendri, 20 Agustus 2019.